



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TRIWULAN I 2026



Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN TRIWULAN I 2026



Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Triwulan I (Januari-Maret 2026) di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua II dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menerapkan sistem kerja yang efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan sistem perencanaan, penganggaran, serta pelaporan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan melalui penerapan SAKIP.

Laporan Triwulan ini memuat uraian mengenai target pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan, capaian kinerja program dan kegiatan, permasalahan yang dihadapi beserta rencana tindak lanjut, serta kesimpulan dan saran. Diharapkan laporan ini dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan selanjutnya.

Dalam penyusunan dan penyajian laporan ini, kami menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dan kekurangan yang memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan laporan pada periode selanjutnya. Dengan disusunnya Laporan Triwulan I Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Tahun 2026, diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja serta akuntabilitas di lingkungan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II.

Manokwari, 13 April 2026

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Papua II



Ir. Stenly Imanuel Tangkere, S.T., M.A.P.

NIP. 197504132005011010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Tugas dan Fungsi	2
I.3 Struktur Organisasi	3
BAB II CAPAIAN KINERJA.....	5
II.1 Target Kinerja Triwulan I berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja	5
II.2 Capaian Target Triwulan	5
II.3 Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan	14
BAB III PENUTUP	16
III.1 Rencana Tindak Lanjut	16
III.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya	17

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Kinerja Balai P3KP Papua II	6
Tabel 2. Target Kinerja Satker PKP Provinsi Papua Barat	9
Tabel 3. Capaian Target Kinerja BP3KP Papua II	10
Tabel 4. Capaian Target Kinerja Satker PKP Papua Barat	12
Tabel 5. Rencana Tindak Lanjut	16
Tabel 6. Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai P3KP Papua II	3
Gambar 2. Struktur Organisasi Satker PKP Provinsi Papua Barat.....	4

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perumahan merupakan hak dasar setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak tersebut melalui penyediaan akses hunian yang layak, aman, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang penting dalam membentuk kehidupan masyarakat yang bermartabat, aman, damai, dan nyaman.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pembangunan perumahan bertujuan untuk menjamin setiap warga negara dapat menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, terencana, terintegrasi, serta berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan yang berkelanjutan, diperlukan penerapan prinsip pembangunan yang seimbang antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang diperkuat oleh dimensi kelembagaan. Prinsip tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Selain itu, pengarusutamaan gender menjadi strategi penting dalam memastikan seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta masyarakat berpenghasilan rendah, memperoleh akses, partisipasi, dan manfaat yang setara dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Dalam konteks tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan yang layak. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II berkomitmen untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan perumahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian kinerja Balai Pelaksana

Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II pada Program Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman menunjukkan hasil yang sangat baik, ditandai dengan terpenuhinya seluruh target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berbagai kegiatan, antara lain Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan dan pemeliharaan rumah susun, penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta dukungan manajemen dan tata kelola organisasi, telah berhasil direalisasikan secara optimal. Keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi yang intensif, pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi secara berkelanjutan, serta komitmen terhadap prinsip transparansi, integritas, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan.

I.2 Tugas dan Fungsi

I.2.1 Tugas Balai P3KP Papua II

Balai P3KP Papua II memiliki tugas dan fungsi yang mengacu pada Permen PKP No. 1 Tahun 2025, dimana Balai P3KP Papua II termasuk kedalam Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Kelas II yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pascabencana dan pascakerusuhan sosial, serta fasilitasi serah terima aset.

I.2.2 Fungsi Balai P3KP Papua II

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan.
2. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
3. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
4. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;

KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA



BAB II

CAPAIAN KINERJA

II.1 Target Kinerja Triwulan I berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja

Target Kinerja Triwulan I disusun berdasarkan Dokumen Rencana Aksi Kinerja BP3KP Papua II. Dokumen Rencana Aksi Kinerja tersebut ditetapkan dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) Awal Tahun Anggaran 2026 antara Kepala BP3KP Papua II dan masing-masing Direktur Jenderal, yang bersumber dari lima Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu DIPA Sekretariat Jenderal, DIPA Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serta DIPA Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Adapun Target Kinerja Triwulan I pada BP3KP Papua II dapat dilihat pada Tabel 1.

II.2 Capaian Target Triwulan

Berdasarkan Rencana Aksi Kinerja Tahun Anggaran 2026, capaian kinerja Triwulan I (Januari–Maret 2026) Balai P3KP Papua II dan Satuan Kerja PKP Papua Barat menunjukkan bahwa realisasi keuangan Balai P3KP Papua II mencapai 18,45%, melampaui target yang ditetapkan sebesar 16,80%. Namun demikian, realisasi fisik baru mencapai 13,50% dari target 16,80%. Sementara itu, Satuan Kerja PKP Papua Barat mencatat realisasi keuangan sebesar 0,39% dari target 10%, dengan realisasi fisik sebesar 0% dari target 15%.

Secara umum, capaian tersebut mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan pada Triwulan I belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kondisi ini terutama disebabkan oleh belum dimulainya pelaksanaan kegiatan fisik, sehingga penyerapan anggaran masih relatif rendah dan belum optimal. Meskipun demikian, sejumlah tahapan persiapan program telah dilaksanakan, antara lain proses seleksi dan rekrutmen tenaga fasilitator serta verifikasi teknis Program BSPS Tahun Anggaran 2026. Selain itu, untuk kegiatan PSU telah dilaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi teknis lapangan sebagai bagian dari tahapan awal pelaksanaan program.

Tabel 1. Target Kinerja Balai P3KP Papua II

INDIKATOR KINERJA			Target PK	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)							
				TW I		TW II		TW III		TW IV	
				KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS
SEKRETARIAT JENDERAL											
SK-1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal										
1	Jumlah Layanan Umum	Layanan	24	24	50	50	84	84	100	100	
2	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	24	24	50	50	84	84	100	100	
3	Jumlah Layanan Sarana Internal	Unit	24	24	50	50	84	84	100	100	
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN											
SK-1	Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni										
1	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Dokumen	16	16	50	50	79	79	100	100	
2	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	16	16	50	50	79	79	100	100	
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman										
1	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dokumen	16	16	50	50	79	79	100	100	
SK-3	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman										
1	Jumlah Layanan Umum	Layanan	16	16	50	50	79	79	100	100	
2	Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	16	16	50	50	79	79	100	100	
3	Jumlah Layanan BMN	Layanan	16	16	50	50	79	79	100	100	
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN											
SK-1	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan										
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	19	19	52	52	78	78	100	100	

INDIKATOR KINERJA		Target PK	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)							
			TW I		TW II		TW III		TW IV	
			KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	Laporan	19	19	52	52	78	78	100	100
SK-2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan									
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	19	19	52	52	78	78	100	100
SK-3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan									
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	19	19	52	52	78	78	100	100
SK-4	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan									
1	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Dokumen	19	19	52	52	78	78	100	100
SK-5	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan									
1	Jumlah Layanan Umum	Layanan	19	19	52	52	78	78	100	100
SK-6	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan									
1	Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	19	19	52	52	78	78	100	100
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN										
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan									
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	18	18	45	45	72	72	100	100
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	18	18	45	45	72	72	100	100
SK-2	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan									
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	18	18	45	45	72	72	100	100

INDIKATOR KINERJA		Target PK	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)							
			TW I		TW II		TW III		TW IV	
			KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS
SK-3	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan									
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	18	18	45	45	72	72	100	100
SK-4	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan									
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	18	18	45	45	72	72	100	100
SK-5	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan									
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	18	18	45	45	72	72	100	100
SK-6	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan									
1	Jumlah Layanan Umum	Layanan	18	18	45	45	72	72	100	100
2	Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	18	18	45	45	72	72	100	100
3	Jumlah Layanan BMN	Layanan	18	18	45	45	72	72	100	100
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN										
SK-1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel									
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	15	15	58	58	80	80	100	100
SK-2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman									
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	15	15	58	58	80	80	100	100
SK-3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman									
1	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	Rekomendasi Kebijakan	15	15	58	58	80	80	100	100

Tabel 2. Target Kinerja Satker PKP Provinsi Papua Barat

INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	AKTIVITAS	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)							
				TW I		TW II		TW III		TW IV	
				KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS
SEKRETARIAT JENDERAL											
SK-1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal										
1	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Melaksanakan layanan umum	10	15	35	40	70	75	100	100
2	Jumlah Layanan Perkantoran	1 Layanan	Melaksanakan layanan perkantoran	10	15	35	40	70	75	100	100
3	Jumlah Layanan Sarana Internal	1 Unit	Melaksanakan layanan sarana internal	10	15	35	40	70	75	100	100
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN											
SK-1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Kawasan Permukiman										
1	Jumlah Unit Rumah Swadaya Melalui Peningkatan Kualitas	2400 Unit	Menyelesaikan Program BSPS	10	15	35	40	70	75	100	100
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman										
1	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	Melaksanakan layanan umum	10	15	35	40	70	75	100	100
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN											
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan										
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Laporan	Menyusun Laporan Pemantauan dan Evaluasi	10	15	35	40	70	75	100	100
2	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	900 Unit	Menyelesaikan Program BSPS	10	15	35	40	70	75	100	100
SK-2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan										
1	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	Melaksanakan Layanan Umum	10	15	35	40	70	75	100	100

INDIKATOR KINERJA		TARGET PK	AKTIVITAS	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN (%)							
				TW I		TW II		TW III		TW IV	
				KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS	KEU	FIS
DIREKTORAT JENDERAL PERKOTAAN											
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan										
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1 Laporan	Menyusun Laporan Pemantauan dan Evaluasi	10	15	35	40	70	75	100	100
2	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	600 Unit	Menyelesaikan Program BSPS	10	15	35	40	70	75	100	100
SK-2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan										
1	Jumlah Layanan Umum	1 Layanan	Melaksanakan Layanan Umum	10	15	35	40	70	75	100	100

Tabel 3. Capaian Target Kinerja Balai P3KP Papua II

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu	Realisasi	Keuangan (%)		Fisik (%)	
				(Rp)	(Rp)	RN	RL	RN	RL
SEKRETARIAT JENDERAL									
Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal				1.284.829.000	353.914.028	16	27,55	16	27,02
SK-1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal								
1	Jumlah Layanan Umum	1	Layanan	72.628.000	63.963.428	16	88,07	16	88,07
2	Jumlah Layanan Perkantoran	1	Layanan	1.162.712.000	289.950.600	16	24,94	16	11,64
3	Jumlah Layanan Sarana Internal	1	Unit	49.489.000	0	16	0,00	16	0,00
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN									
Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman				181.046.000	51.961.436	16	28,70	16	18,35
SK-1	Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni								
1	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	1	Dokumen	52.161.000	0	16	0	16	0
2	Jumlah Laporan Penyusunan Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	1	Rekomendasi Kebijakan	128.885.000	0	16	0	16	0
SK-2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni di Kawasan Permukiman								
1	Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	1	Dokumen	106.151.000	29.097.912	16	27,41	16	40,77

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu	Realisasi	Keuangan (%)		Fisik (%)	
				(Rp)	(Rp)	RN	RL	RN	RL
SK-3	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman								
1	Jumlah Layanan Umum	1	Layanan	76.452.000	22.863.524	16	29,91	16	39,64
2	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	14.775.000	0	16	0,00	16	0
3	Jumlah Layanan BMN	1	Layanan	42.500.000	0	16	0,00	16	0
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN									
Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				336.441.000	3.450.000	19	1,03	19	8,43
SK-1	Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1	Rekomendasi Kebijakan	21.000.000	3.450.000	19	16,43	19	19,20
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan	1	Laporan	22.400.000	0	19	0,00	19	0
SK-2	Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1	Rekomendasi Kebijakan	75.400.000	0	19	0,00	19	0
SK-3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Rekomendasi Kebijakan	143.731.000	0	19	0,00	19	0
SK-4	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan								
1	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Dokumen	50.227.000	0	19	0,00	19	0
SK-5	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan								
1	Jumlah Layanan Umum	1	Layanan	21.416.000	0	19	0,00	19	0
SK-6	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan								
1	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	2.267.000	0	19	0,00	19	0
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN									
Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan				329.393.000	17.361.580	18	5,27	18	6,00
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	57.225.000	2.800.000	18	4,89	18	6,63
2	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Laporan	49.292.000	14.561.580	18	29,54	18	32,88
SK-2	Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	34.719.000	0	18	0,00	18	0
SK-3	Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	32.900.000	0	18	0,00	18	0
SK-4	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	45.934.000	0	18	0,00	18	0

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu	Realisasi	Keuangan (%)		Fisik (%)	
				(Rp)	(Rp)	RN	RL	RN	RL
SK-5	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	1	Rekomendasi Kebijakan	65.151.000	0	18	0,00	18	0
SK-6	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan								
1	Jumlah Layanan Umum	1	Layanan	14.445.000	0	18	0,00	18	0
2	Jumlah Layanan Data dan Informasi	1	Layanan	14.925.000	0	18	0,00	18	0
3	Jumlah Layanan BMN	1	Layanan	14.802.000	0	18	0,00	18	0
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN									
Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman				206.816.000	4.840.800	15	2,34	15	7,70
SK-1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1	Rekomendasi Kebijakan	110.732.000	0	15	0,00	15	0
SK-2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman								
1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	2	Rekomendasi Kebijakan	76.501.000	0	15	0,00	15	0
SK-3	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman								
1	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko	1	Rekomendasi Kebijakan	19.583.000	4.840.800	15	24,72	15	31,53
Total				2.338.525.000	431.527.844	15	18,45	16,80	13,50

Tabel 4. Capaian Target Kinerja Satker PKP Papua Barat

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
						RN	RL	RN	RL
SEKRETARIAT JENDERAL									
Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal				697.092.000	29.912.401	10,00	4,29	15,00	0,00
SK-1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Sekretariat Jenderal								
1	Jumlah Layanan Umum	1	Layanan	26.121.000	14.544.623	10,00	55,68	15,00	0,00
2	Jumlah Layanan Perkantoran	1	Layanan	637.978.000	15.367.778	10,00	2,41	15,00	0,00
3	Jumlah Layanan Sarana Internal	1	Unit	32.993.000	0	10,00	0,00	15,00	0,00
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN									
Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman				73.042.645.000	327.315.531	10,00	0,45	15,00	0,00
SK-1	Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni di Kawasan Permukiman								
1	Jumlah Unit Rumah Swadaya Melalui Peningkatan Kualitas	2400	Unit	72.967.332.000	283.492.642	10,00	0,39	15,00	0,00
SK-2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman								
1	Jumlah Layanan Umum	1	Layanan	75.313.000	43.822.889	10,00	58,19	15,00	0,00

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Vol	Satuan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Keuangan (%)		Fisik (%)	
						RN	RL	RN	RL
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERDESAAN									
Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				27.828.254.000	76.455.221	10,00	0,27	15,00	0,00
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Pembangunan Perumahan Perdesaan								
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Laporan	78.400.000	24.274.618	10,00	30,96	15,00	0,00
2	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perdesaan	900	Unit	27.738.654.000	52.180.603	10,00	0,19	15,00	0,00
SK-2	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan								
1	Jumlah Layanan Umum	1	Layanan	11.200.000	0	10,00	0,00	15,00	0,00
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN									
Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan				19.726.897.000	34.060.114	10,00	0,17	15,00	0,00
SK-1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan								
1	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1	Laporan	28.622.000	3.831.806	10,00	13,39	15,00	0,00
2	Jumlah Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	600	Unit	19.685.438.000	30.227.738	10,00	0,15	15,00	0,00
SK-2	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.								
1	Jumlah Layanan Umum	1	Layanan	12.837.000	570	10,00	0,004	15,00	0,00
TOTAL				121.294.888.000	467.743.267	10,00	0,39	15,00	0,00

II.3 Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan

Berdasarkan Tabel di atas, diketahui bahwa capaian target kinerja yang mengacu pada Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II secara umum telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Namun demikian, dalam proses pencapaian target tersebut masih terdapat beberapa permasalahan, khususnya pada pelaksanaan paket pekerjaan fisik, dengan uraian sebagai berikut:

II.3.1 PPK Balai

II.3.2 PPK Perencanaan dan Pengendalian

- a. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
 - Perubahan Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan Direktorat Jenderal Perkotaan
- b. Barang Milik Negara (BMN)
 - Ditemukan ketidaksesuaian antara data pencatatan kondisi barang BMN di neraca di aplikasi sakti dengan kondisi riil aset di lapangan.

II.3.2 PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman

- a. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
 - Instruksi verifikasi tahap I (436 BNBA), Instruksi verifikasi tahap II (603 BNBA) dan Instruksi verifikasi tahap III (776 BNBA) total 1.815 BNBA proses vertek lapangan belum optimal mengingat vertek lapangan baru 874 BNBA dan baru menghasilkan data Memenuhi Syarat 260 BNBA.
 - Tahapan verifikasi teknis CPB BSPS TA.2026 masih berlangsung dan dalam proses pelaksanaan untuk Tahap 2 dan Tahap 3, dan belum dapat dinyatakan selesai secara keseluruhan di laman <https://go.pkp.go.id/>
- b. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - Ditemukan ketidaksesuaian bangunan perumahan antara di dokumen Siteplan dengan yang ada di lapangan pada perumahan Griya Andai di Kabupaten Manokwari, dan telah mendapat bantuan PSU sebanyak 4 (empat) kali di lokasi yang sama dengan total daya tampung 200 unit.
 - Kurangnya dokumen administrasi brosur penjualan yang belum dicap oleh pengembang pada perumahan Soribo Gunung di Kabupaten Manokwari.

- Terdapat ketidaksesuaian data daya tampung perumahan antara di dokumen Siteplan dan di lapangan dengan data usulan, dan brosur penjualan yang belum dicap oleh pengembang pada perumahan Sogun Permai 6 di Kabupaten Manokwari.
- c. Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
- Menunggu SK Penetapan Lokasi Dirjen Kota
 - Belum lengkapnya dokumen pengajuan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kota Sorong Kecamatan Sorong Manoi Desa Malawei (15,04 ha) yang diajukan oleh Pemerintah Kota Sorong di laman <http://www.sibaru.pkp.go.id>.

BAB III PENUTUP

III.1 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan penjabaran permasalahan yang terjadi dalam pencapaian target kinerja sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua II, selanjutnya disusun rencana tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel 5. Rencana Tindak Lanjut

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
PPK BALAI		
PPK PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN		
1	Perubahan Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan Direktorat Jenderal Perkotaan	Telah dilakukan perbaikan dokumen Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan Direktorat Jenderal Perkotaan dengan menggunakan DIPA Revisi 02, dan sudah di tandatangan oleh Kabalai P3KP Papua II dan Kasatker PKP Provinsi Papua Barat
2	Ditemukan ketidaksesuaian antara data pencatatan kondisi barang BMN di neraca di aplikasi sakti dengan kondisi riil aset di lapangan.	Membentuk Tim Inventarisasi BMN dan Pelaksanaan Inventarisasi aset BMN terkait penyesuaian data pencatatan kondisi barang BMN di neraca di aplikasi sakti dengan kondisi riil aset di lapangan.
PPK RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS		
PPK RUMAH SWADAYA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN		
BSPS		
1	Instruksi verifikasi tahap I (436 BNBA), Instruksi verifikasi tahap II (603 BNBA) dan Instruksi verifikasi tahap III (776 BNBA) total 1.815 BNBA proses vertek lapangan belum optimal mengingat vertek lapangan baru 874 BNBA dan baru menghasilkan data Memenuhi Syarat 260 BNBA.	Mendorong Tim Verifikasi dan Pengawasan (Kasie I & Kasie II Balai P3KP Papua II) dalam pelaksanaan vertek lapangan melalui pengurangan keterlibatan staf Balai & Satker, dan penugasan dialihkan ke TFL dan Korkab hasil seleksi/rekrutmen (24 Februari 2026) serta Rekrutmen Tambahan TFL.
2	Tahapan verifikasi teknis CPB BSPS TA.2026 masih berlangsung dan dalam proses pelaksanaan untuk Tahap 2 dan Tahap 3, dan belum dapat dinyatakan	Mempercepat proses verifikasi teknis dengan mengerahkan seluruh tim verifikasi ke lapangan.

No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
	selesai secara keseluruhan di laman https://go.pkp.go.id/ .	
PSU		
1	Terdapat pergeseran bangunan perumahan antara di <i>Siteplan</i> dengan yang ada di lapangan pada perumahan Griya Andai di Kabupaten Manokwari, dan telah mendapat bantuan PSU jalan lingkungan sebanyak 4 (empat) kali di lokasi yang sama dengan total daya tampung 200 unit.	Perumahan Griya Andai tidak berpotensi mendapatkan bantuan PSU TA.2026 untuk jalan lingkungan karena telah menerima bantuan PSU untuk jalan lingkungan sebelumnya sebanyak 4 (empat) kali di lokasi yang sama dengan total daya tampung 200 unit.
2	Kurangnya dokumen administrasi brosur penjualan yang belum dicap oleh pengembang pada perumahan Soribo Gunung di Kabupaten Manokwari	Segera menginstruksikan pengembang untuk melengkapi dokumen administrasi yang belum dilengkapi
3	Terdapat ketidaksesuaian data daya tampung perumahan antara di dokumen <i>Siteplan</i> dan di lapangan dengan data usulan pengembang, dan brosur penjualan yang belum dicap oleh pengembang pada perumahan Sogun Permai 6 di Kabupaten Manokwari	Segera menginstruksikan pengembang untuk menyesuaikan data daya tampung antara di <i>Siteplan</i> dengan data usulan pengembang, serta melengkapi dokumen administrasi yang belum lengkap
PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH		
1	Menunggu SK Penetapan Lokasi Dirjen Kota	Melakukan Verifikasi Sambil menunggu SK Penetapan Lokasi Dirjen Perkotaan
2	Belum lengkapnya dokumen <i>readyness criteria</i> pengajuan usulan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kota Sorong Kecamatan Sorong Manoi Desa Malawei (15,04 ha) yang diajukan oleh Pemerintah Kota Sorong di laman http://www.sibaru.pkp.go.id .	Mengadakan rapat pembahasan hasil verifikasi administrasi dan teknis usulan kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kota Sorong Kecamatan Sorong Manoi Desa Malawei (15,04 ha)

III.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya

Tabel 6. Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya

Triwulan Sebelumnya				Triwulan I		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
PPK BALAI						
PPK PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN						
				1	Perubahan Dokumen Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan Direktorat Jenderal Perkotaan	Telah dilakukan perbaikan dokumen Perjanjian Kinerja Revisi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman dan Direktorat Jenderal Perkotaan dengan menggunakan DIPA Revisi 02, dan sudah di tandatangan oleh Kabalai P3KP Papua II

Triwulan Sebelumnya				Triwulan I		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
						dan Kasatker PKP Provinsi Papua Barat
				2	Ditemukan ketidaksesuaian antara data pencatatan kondisi barang BMN di neraca di aplikasi sakti dengan kondisi riil aset di lapangan.	Membentuk Tim Inventarisasi BMN dan Pelaksanaan Inventarisasi aset BMN terkait penyesuaian data pencatatan kondisi barang BMN di neraca di aplikasi sakti dengan kondisi riil aset di lapangan.
PPK RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS						

Triwulan Sebelumnya				Triwulan I		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
PPK RUMAH SWADAYA DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN						
BSPS						
				1	Instruksi verifikasi tahap I (436 BNBA), Instruksi verifikasi tahap II (603 BNBA) dan Instruksi verifikasi tahap III (776 BNBA) total 1.815 BNBA proses vertek lapangan belum optimal mengingat vertek lapangan baru 874 BNBA dan baru menghasilkan data Memenuhi Syarat 260 BNBA.	Mendorong Tim Verifikasi dan Pengawasan (Kasie I & Kasie II Balai P3KP Papua II) dalam pelaksanaan vertek lapangan melalui pengurangan keterlibatan staf Balai & Satker, dan penugasan dialihkan ke TFL dan Korkab hasil seleksi/rekrutmen (24 Februari 2026) serta Rekrutmen Tambahan TFL.
				2	Tahapan verifikasi teknis CPB BSPS TA.2026 masih berlangsung dan dalam proses pelaksanaan untuk Tahap 2 dan Tahap 3, dan belum dapat dinyatakan selesai secara keseluruhan di laman https://go.pkp.go.id/ .	Mempercepat proses verifikasi teknis dengan mengerahkan seluruh tim verifikasi ke lapangan.

Triwulan Sebelumnya				Triwulan I		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
PSU						
				1	Terdapat pergeseran bangunan perumahan antara di <i>Siteplan</i> dengan yang ada di lapangan pada perumahan Griya Andai di Kabupaten Manokwari, dan telah mendapat bantuan PSU jalan lingkungan sebanyak 4 (empat) kali di lokasi yang sama dengan total daya tampung 200 unit.	Perumahan Griya Andai tidak berpotensi mendapatkan bantuan PSU TA.2026 untuk jalan lingkungan karena telah menerima bantuan PSU untuk jalan lingkungan sebelumnya sebanyak 4 (empat) kali di lokasi yang sama dengan total daya tampung 200 unit.
				2	Kurangnya dokumen administrasi brosur penjualan yang belum dicap oleh pengembang pada perumahan Soribo Gunung di Kabupaten Manokwari	Segara menginstruksikan pengembang untuk melengkapi dokumen administrasi yang belum dilengkapi
				3	Terdapat ketidaksesuaian data daya tampung perumahan antara di dokumen <i>Siteplan</i> dan di lapangan dengan data usulan pengembang, dan brosur penjualan yang belum dicap oleh pengembang pada	Segara menginstruksikan pengembang untuk menyesuaikan data daya tampung antara di <i>Siteplan</i> dengan data usulan pengembang, serta melengkapi dokumen administrasi yang belum lengkap

Triwulan Sebelumnya				Triwulan I		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
					perumahan Sogun Permai 6 di Kabupaten Manokwari	
PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH						



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DIREKTORAT JENDERAL KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA II